

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang implementasi peningkatan pajak daerah kabupaten Seruyan, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Kabupaten Seruyan adalah kabupaten dari hasil otonomi daerah yang pada awal pembentukannya masih sangat bergantung pada kabupaten induk yaitu kabupaten kotawaringin timur yang beribukota di Sampit. Kebergantungan tersebut terkait dengan pelaksanaan pajak beserta pembagiannya.
2. Kebijakan – kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Seruyan sesuai dengan keinginan untuk meningkatkan pajak serta pendapatan asli daerah kabupaten Seruyan.
3. Dalam pelaksanaan peningkatan pajak program – program yang dilaksanakan sangat membantu dan menambah pendapatan daerah walaupun masih belum optimal pelaksanaannya.
4. Komunikasi yang diberlakukan antara pemerintah daerah dalam hal ini adalah dinas pendapatan daerah kabupaten Seruyan dengan masyarakat.

5. Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Seruyan cukup memadai dalam melaksanakan program – program yang telah dibuat serta sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang hal tersebut.

6. Masyarakat sebagai wajib pajak menyadari bahwa keberadaan mereka sangat membantu pengembangan daerah melalui pajak yang mereka bayarkan dan pemerintah sebagai pengelola pajak bertanggung jawab atas pengelolaannya serta menggunakan hasil pajak untuk kepentingan bersama (masyarakat)

B. SARAN

Adapun saran yang hendak diberikan peneliti guna untuk kemajuan dinas pendapatan daerah kabupaten Seruyan dan pemerintah kabupaten Seruyan yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kabupaten yang baru hendaknya kabupaten Seruyan belajar melalui kabupaten – kabupaten yang telah sukses melaksanakan otonomi daerah sehingga kedepannya cita – cita dari otonomi daerah dapat tercapai.
2. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dinas pendapatan daerah kabupaten Seruyan hendaknya melaksanakan dengan tertib tanpa pandang bulu kepada siapa saja yang menjadi wajib pajak tanpa melihat status dan golongan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM harus selalu dilakukan agar tercapai target yang di harapkan. Pengangkatan birokrasi pun harus sesuai dengan kompetensi sttaf yang dibutuhkan sehingga dalam pengangkatan tidak terjadi penggelembungan staf yang tak berarti dan pada akhirnya akan menjadikan pemborosan dalam belanja daerah terutama pembayaran gaji staf.
4. Komunikasi antara pemerintah daerah terutama dinas pendapatan daerah dengan masyarakat harus sering dilakukan guna membangkitkan semangat bayar

5. Pengembangan kualitas dan kemampuan sumberdaya aparatur sangat penting untuk selalu ditingkatkan agar pelaksanaan peningkatan pajak berjalan dengan baik dan bagus.

6. Masyarakat sebagai wajib pajak hendaknya sadar akan kewajibannya tanpa harus dipaksa dalam pembayaran pajak. Serta harus selalu komunikatif dan aktif dalam setiap sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program – program yang berdasarkan pada kebijakan peningkatan pajak yang dilakukan oleh Dinas